BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2015 memiliki luas wilayah konservasi daratan 22.10 juta Ha dengan jumlah konservasi 27.42 juta Ha serta jumlah luas daratan kawasan hutan 120.77 juta Ha.¹Sumber daya alam melimpah yang dimiliki Indonesia, sudah pasti Indonesia kaya akan flora dan fauna yang sekaligus terbilang langka karena keunikan dan keeksotikannya terutama pada bagian sumber daya alam yang berada di kawasan hutan Indonesia, Didalam hutan tersebut Indonesia memiliki kekayaan alam yang terdiri dari sumber daya alam hayati dan non-hayati, di dalam sumber daya alam hayati hutan Indonesia memiliki aneka hewan yang unik dan kharismatik seperti gajah, badak bercula satu, kambing hutan sumatera (*Capricornis sumatraensis*).

Satwa menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang selanjutnya disebut Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam dalam Pasal 1 Ayat (5) sumber daya alam hayati adalah unsur-unsur hayati di alam yang terdiri dari sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya hewani (satwa) yang bersama dengan unsur non hayati disekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem. Sedangkan yang dikatakan satwa liar menurut Pasal 1 Ayat (7) adalah semua binatang yang hidup di darat, di air dan di udara yang

¹ Badan Pusat Statistik, 2017, *Luas Kawasan Hutan dan Kawasan Konservasi Perairan Indonesia Menurut Provinsi Berdasarkan SK Menteri Kehutanan*, <https://www.bps.go.id/link.TabelStatis/view/id/1716/> diakses pada jam 17.00 hari rabu 13maret 2019.

masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia. Tergolong Satwa yang dilindungi menurut Pasal 20 Ayat (2) adalah : a. tumbuhan dan satwa dalam bahaya kepunahan; b. tumbuhan dan satwa yang populasinya jarang.

Ketentuan pidana yang berkaitan dengan keselamatan satwa yang dilindungi diatur dalam Pasal 40 Ayat (2) dengan isi pasalnya adalah setiap orang dilarang untuk mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati, dari kesuatu tempat ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Perdagangan Satwa yang dilindungi tersebut apabila tidak segera ditangani tentunya akan mengakibatkan permasalahan yang cukup serius dikemudian hari, antara lain kepunahan populasi yang ada di Alam, bahkan mengganggu keseimbangan ekosistem dan siklus rantai makanan yang ada dan pada akhirnya membawa dampak buruk yang sangat vital bagi keberlangsungan hidup seluruh makhluk yang ada di bumi. Apabila dibiarkan maka dikhawatirkan suatu saat akan terjadi suatu kepunahan yang menyebabkan generasi mendatang hanya akan bisa mengenal hewan tersebut melalui foto dokumentasi saja. Pengendalian Perdagangan Satwa yang dilindungi agar tidak menjadi punah harus memerlukan bantuan yang serius dari pemerintah. Perdagangan satwa yang dilindungi dengan demikian adalah merupakan suatu tindak pidana.

Pemerintah Indonesia menetapkan kambing hutan Sumatera sebagai salah satu satwa yang dilindungi berdasarkan Lampiran Peraturan Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa dalam Pasal 27 yaitu berupa pengawasan dan pengendalian yang dilakukan melalui tindakan preventif dan represif.

Dalam menyelenggarakan atau melakukan penyidikan terhadap satwa yang dilindungi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Konservasi Sumber Daya Alam melakukan koordinasi kepada Penyidik Kepolisian Agam agar melakukan penyidikan terhadap tindak pidana memperdagangkan kepala kambing hutan tersebut. Sesuai Pasal 39 Undang-Undang No 5 Tahun 1990 mengatur mengenai PPNS yang dapat melakukan penyidikan di lingkungan departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya. PPNS diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam dan hayati dan ekosistemnya.

PPNS diatur dalam KUHAP dan Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia yang menjelaskan “Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu berdasarkan peraturan perundangan-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing. Peraturan

Perundangan yang dimaksud tergantung tugas pokok dan fungsi dari lembaga terkait.²

Contoh kasus yang terjadi 2019 tepatnya 22 Januari 2019 telah terjadi tindak pidana perdagangan kepala kambing hutan yang dilindungi. Perdagangan satwa dilindungi ini terungkap, bermula dari laporan kasus penipuan. Seorang warga merasa ditipu oleh si tersangka S, karena uang yang dipinjam tak kunjung dikembalikan. Uang pinjaman itu digunakan untuk membeli kepala kambing hutan dari Pasaman seharga Rp 13 juta. Polsek Bawan, kemudian bergerak kerumah tersangka. Di sanalah, barang bukti itu ditemukan salahsatu satwa yang dilindungi yaitu kepala kambing hutan, Polisi menghubungi BKSDA, dan memang benar itu kepala satwa langka. Pihak BKSDA menambahkan , tersangka mengaku sudah lima tahun terakhir berdagang satwa. Selain kepala kambing hutan tersangka juga pernah menjual kulit harimau.

Melihat kasus seperti itu Undang-undang belum tersosialisasi dengan baik sehingga masyarakat tidak mengetahui bahwa Kambing Hutan Sumatera termasuk satwa yang dilindungi dan langka, sehingga masyarakat belum mampu sepenuhnya untuk menjaga dan membuat pelaku yang melakukan Tindak Pidana ini jera, perlu peran yang signifikan dan peran aktif dari pemerintah serta Balai Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Sumatera Barat dalam menegakan hukum yang tegas terhadap satwa yang dilindungi. Maka dari itu sangatlah penting koordinasi kerja antara penyidik pegawai

²Riko Rahmada,2010, *Mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil:Tahukan Anda?*<https://www.kompasiana.com/rahmada/55003376813311a219fa72fc/mengenai-penyidik-pegawai-negeri-sipil-tahukah-anda> pada tanggal 12 mei 2019, 17.30WIB

negeri sipil balai konsevasi sumber daya alam dengan Kepolisian Resor agam agar satwa yang dilindungi tersebut tidaklah diperdagangkan oleh orang-orang yang merugikan.

Dari uraian latar belakang di atas penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang masalah yang sedang dihadapi dalam bentuk skripsi yang berjudul **“KOORDINASI KERJA ANTARA PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DENGAN POLISI RESOR AGAM DALAM MENYIDIK TINDAK PIDANA PERDAGANGAN KEPALA KAMBING HUTAN YANG DILINDUNDI”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut maka dirumuskan permasalahan yang menjadi ruang lingkup pembahasan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah koordinasi kerja Kepolisian Resor Agam dengan PPNS BKSDA dalam menindak pelaku perdagangan kepala kambing hutan sebagai satwa yang dilindungi?
2. Apakah kendala yang ditemukan Kepolisian Resor Agam dengan PPNS BKSDA dalam menindak pelaku perdagangan kepala kambing hutan sebagai satwa yang dilindungi?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui koordinasi Kerja Kepolisian Resor Agam dengan PPNS BKSDA dalam menindak pelaku perdagangan kepala kambing hutan sebagai satwa yang dilindungi
2. Untuk mengetahui kendala yang ditemukan Kepolisian Resor Agam dengan PPNS BKSDA dalam menindak pelaku perdagangan kepala kambing hutan sebagai satwa yang dilindungi

D. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisa.³

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yaitu penelitian hukum yang menggunakan cek data lapangan.

2. Sumber Data

- a. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari informan sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian langsung ke lapangan yang mana data dikumpulkan sendiri oleh peneliti.⁴Data diperoleh melalui wawancara dengan bapak Joni Akbar S.H dan Zulmi Gusrul pegawai negeri sipil BKSDA dengan bapak BRIPKA N. Mandala Putra S.H dan bapak BRIPKA Alcitra dari satuan Kepolisian Resor Agam.

³Bambang Sunggono, 2015, *Metodologi Penelitian Hukum* cet. 15, PT. Rajawali Pers, Jakarta, hlm 38.

⁴*Ibid*, hlm 37.

- b. Data sekunder adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan seterusnya.⁵ Data sekunder pada penelitian ini diperoleh dari kantor Kepolisian Resor Agam mengenai statistik kriminal perdagangan satwa yang dilindungi.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam usaha pengumpulan data penulis melakukan penelitian dengan cara:

- a. Wawancara adalah proses tanya jawab antara dua orang atau lebih secara langsung. Pewawancara disebut *interviewer*, sedangkan orang yang diwawancarai disebut *interviewee*.⁶ Dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan wawancara semi terstruktur, yaitu penulis menanyakan pertanyaan yang telah disusun terlebih dahulu kemudian dikembangkan sesuai dengan masalah yang diteliti.
- b. Studi dokumen merupakan cara teknik pengumpulan data dengan membaca dan memperoleh bahan-bahan tertulis seperti buku-buku ilmiah, peraturan perundangan, hasil penelitian, artikel-artikel yang berhubungan dengan masalah yang diteliti oleh penulis⁷.

4. Analisis Data

Data yang diperoleh akan dianalisa secara kualitatif, yaitu menganalisa data menurut aspek-aspek yang diteliti dan selanjutnya diambil dari suatu

⁵ Soerjono Soekanto, 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm 12.

⁶Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, 2011, *Metodologi Penelitian Sosial*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm 55.

⁷ Soerjono Soekanto, Op.Cit, hlm 21.

kesimpulan yang relevan atau berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini⁸.

⁸Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar. *Op. Cit*, hlm 32.